

LPPUPD – SKPD

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022



disnakerind

TANAH LAUT-K O M P E T I T I F

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan dalam menyelesaikan LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPUPD - SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan dalam prinsip Otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian telah diselesaikan beberapa cacatan penting yaitu : pelatihan dan penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, harmonisasi hubungan industrial, peningkatan kualitas IKM.

Seiring dengan penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tahun 2022 belum ditemukan permasalahan yang berarti namun Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut beserta segenap jajarannya berupaya mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun kritik dan saran membangun senantiasa diharapkan sebagai barometer perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Demikian LPPUPD - SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2022 disusun, atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada kita semua..... Aamiin.

Pelaihari, Januari 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,


MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABLE.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum SKPD.....	1
a) Struktur Organisasi	1
b) Kepegawaian	2
c) Kondisi Sarana dan Prasarana.....	3
d) Data Statistik	6
e) Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.....	22
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	23
1. Urusan Wajib (Bidang Ketenagakerjaan)	23
a. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja).....	23
b. Program Kegiatan	23
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran	24
d. Permasalahan dan Solusi.....	25
2. Urusan Pilihan (Bidang Perindustrian)	26
a. Kesesuaian perencanaan pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)	26
b. Program Kegiatan	26
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran	27
d. Permasalahan dan Solusi.....	28
3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Keseekretariatan)	28
a. Kesesuaian perencanaan pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)	28
b. Program Kegiatan	28
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran	30
d. Permasalahan dan Solusi.....	32
2. Urusan Pemerintahan Umum.....	32
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	33
a. Dasar Hukum	33
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan / Dana Dekonsentrasi	34
c. Program, Kegiatan	35
d. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan	35
e. Sumber dan Jumlah anggaran yang digunakan.....	36
f. Realisasi Pelaksanaa Program dan Kegiatan	37
g. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	38

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	40
1. Kerja Sama Daerah	40
a. Mitra yang diajak Kerjasama	40
b. Dasar Hukum	40
c. Bidang Kerjasama	40
d. Nama Kegiatan	40
e. Sumber dan Jumlah Anggaran	40
f. Jangka waktu kerjasama	40
g. Hasil (output) dari kerjasama	40
h. Permasalahan dan Solusi	40
2. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	40
3. Pengelolaan Kawasan Khusus	40
a. Jenis Kawasan Khusus :	40
b. Status kepemilikan kawasan khusus :	40
c. Sumber Anggaran :	40
d. Permasalahan yang dihadapi :	41
4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	41
5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	41
BAB V PENUTUP	42
1. Kesimpulan	42
2. Keberhasilan/ Prestasi/ Penghargaan	43
a. Prestasi Yang dicapai Oleh Lembaga/ masyarakat Binaan DISNAKERIND	43

DAFTAR TABLE

Tabel 1. 1 Gambaran Sarana dan Prasarana Tahun 2022.....	6
Tabel 1. 2 Rekapitulasi Data Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja DISNAKERIND	7
Tabel 1. 3 Rekapitulasi Data pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Subkooor Penta	8
Tabel 1. 4 Rekapitulasi Data Perluasan Kesempatan Kerja	8
Tabel 1. 5 Data Pengesahan Peraturan Perusahaan	9
Tabel 1. 6 Data Pendaftaran Perjanjian Bersama	10
Tabel 1. 7 Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	12
Tabel 1. 8 Indeks Kepesertaan jaminan Sosial Kepesertaan Formal	15
Tabel 1. 9 Indeks Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepesertaan Informal	15
Tabel 1. 10 Data Pemberi Kerja Aktif Yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan.....	16
Tabel 1. 11 Indeks Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepesertaan Jasa Konstruksi	16
Tabel 1. 12 Data Jumlah Lembaga Kerjasama Bipartit	17
Tabel 1. 13 Data Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/PB)	18
Tabel 1. 14 Data Tahapan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	18
Tabel 1. 15 Data Jumlah Pemutusan Hubungan Kerja	19
Tabel 1. 16 Data Statistik Penambahan Jumlah IKM dan Masyarakat yang Mendapatkan Pelatihan	20
Tabel 1. 17 Data Statistik Penambahan Jumlah IKM yang Menggunakan Inovasi Teknologi dalam Kegiatan Produksi ...	20
Tabel 1. 18 Data Statistik Penambahan Jumlah IKM yang Meningkatkan Kreatifitas Desain Produknya	20
Tabel 1. 19 Data Statistik Jumlah Kumulatif IKM di Tanah Laut.....	20
Tabel 1. 20 Data Statistik Perusahaan dalam SIINAS Tanah Laut.....	21
Tabel 1. 21 Data Statistik Rekomendasi Perizinan Industri yang diterbitkan.....	21
Tabel 1. 22 Data Statistik Fasilitas Perizinan NIB OSS	21
Tabel 1. 23 Data Keikutsertaan Pameran Dalam dan Luar Daerah	21
Tabel 1. 24 Jumlah Laporan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	22
Tabel 1. 25 Pelaksanaan Pelatihan UPT Balai Latihan Kerja.....	22
Tabel 2. 1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Ketenagakerjaan.....	25
Tabel 2. 2 Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Perindustrian	28
Tabel 2. 3 Alokasi dan Realisasi Kesekretariatan	31
Tabel 2. 4 Alokasi dan Realisasi UPT Balai Latihan Kerja	32
Tabel 3. 1 Rencana Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT BLK.....	35
Tabel 3. 2 Rencana Anggaran Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	36
Tabel 3. 3 Jumlah Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	36
Tabel 3. 4 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan UPT BLK	37
Tabel 3. 5 Realisasi Penyerapan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	38
Tabel 3. 6 Realisasi Rincian Penyerapan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	38
Tabel 5. 1 Penghargaan yang diraih Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.....	43
Tabel 5. 2 Prestasi / Penghargaan yang diraih Lembaga / Masyarakat Binaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 71. Undang-undang ini mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kewajiban penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban juga diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD.

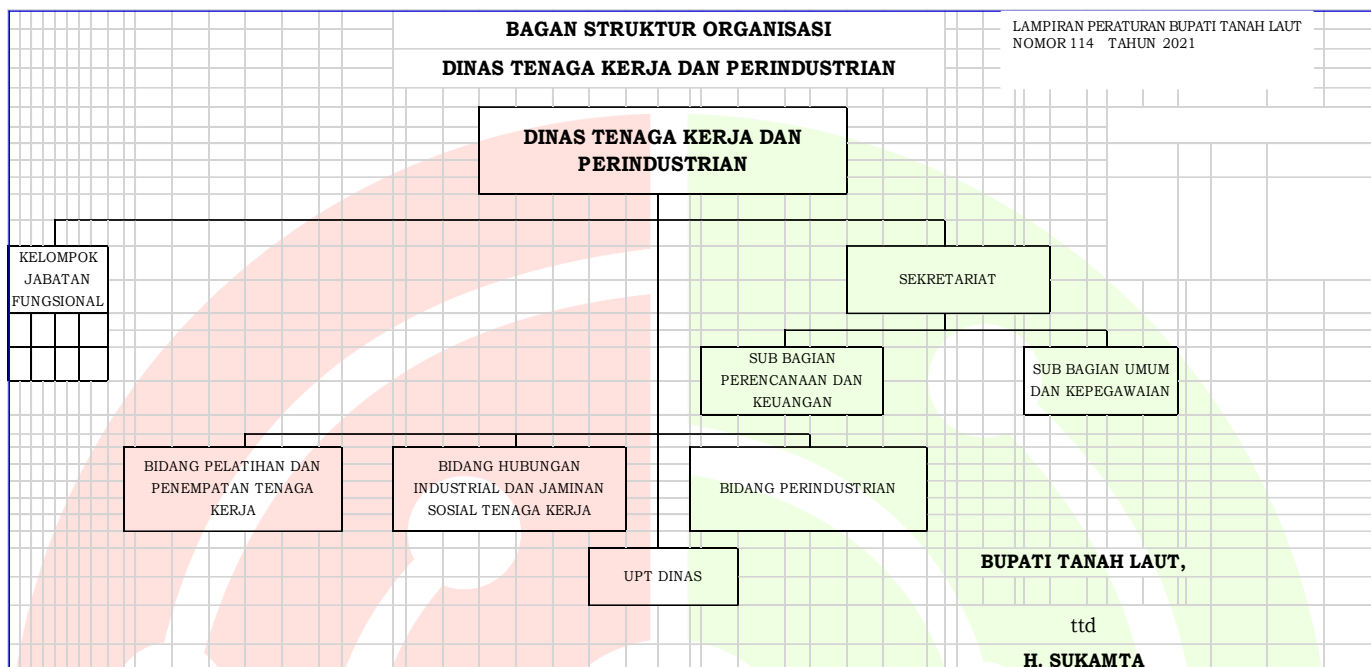
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan 1 (satu) kali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian serta bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah.

B. Gambaran Umum SKPD

a) Struktur Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terdiri dari :
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari:
 - e. Bidang Perindustrian, terdiri dari:

- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



b) Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, sampai Bulan Desember 2021 adalah 39 Orang yang terdiri dari :

- Berdasarkan Pendidikan :

S2	=	6	orang
S1	=	22	orang
D3	=	5	orang
SLTA	=	6	orang

a) Berdasarkan Golongan :

IV/c	=	1	orang
IV/b	=	1	orang
IV/a	=	5	orang
III/d	=	8	orang
III/c	=	3	orang
III/b	=	7	orang
III/a	=	10	orang

II/d = 3 orang
II/c = - orang
II/b = - orang
I/c = 1 orang

- Menurut Jabatan Struktural / Fungsional adalah :

Kepala Dinas (Eselon II b) = 1 orang
Sekretaris (Eselon III a) = 1 orang
Kepala Bidang (Eselon III b) = 3 orang
Kasubbag / Kepala UPT = 3 orang
Kasubbag TU. BLK (Eselon IV b) = 1 orang
Jabatan Fungsional / Instruktur JFT = 20 orang
Non jabatan / staf = 10 orang

c) Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1.	Tanah Kantor	2265 m ²	v		
2.	Tanah BLK	20.000 m ²	v		
3.	Gedung Kantor	1 buah	v		
4.	Gedung BLK	1 buah	v		
5.	Kendaraan Roda 2	9	7	2	
6.	Kendaraan Roda 4	4	4	-	-
7.	Global Positioning system (GPS)	1	v		
8.	Air Conditioning Unit	2			
9.	Mesin ketik manual portable	-			
10.	Filling Besi/metal	18	18		
12.	Papan Pengumuman	2	v	-	-
13.	Genset	2	v		
14.	Bangku Tunggu	2	v		
15.	Meja Rapat	44	v		
16.	Kursi Tamu	8	6	1	1
17.	Meja Komputer	6	v		
18.	Kursi kerja	36	25	11	1
19.	Banner	1	1		
20.	Lemari Es	5	v		
21.	AC Split	40	36		
22.	Kipas Angin	8	8		
23.	P.C unit/ Komputer PC	46	33	12	1
24.	Laptop	23	23		-
25.	Note Book	1	1		-

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
26.	LCD	1	1		
27.	CPU	1	1		
28.	Monitor	1	1		
29.	Printer	29	26	-	3
30.	UPS	1			
31.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	v		1
32.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	3	2	1
33.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	9	1	
34.	Meja Kerja	31	29	2	
35.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2		
36.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	7		
37.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	25	23		
38.	Camera + Attachment	1	v		
39.	Proyektor + Attachment	3	3		
40.	Handycam	1	v		
41.	Televisi 30 inc	2	-		2
42.	Camera Electronic	4	3	1	
43.	wireless Portable (Sound System)	3	3		
44.	Mesin Gerinda	11	v		
45.	Mesin Kompresor	2	2		
46.	Mesin Gerinda Tangan	1	-		
47.	Mesin Bor Tangan	2	v		1
48.	Perkakas Bengkel Lain-Lain	11	11		
49.	Perkakas Bengkel Service Lain-lain	2	1	1	
50.	Mesin Gergaji	3	v		
51.	Mesin Ketam	1	v		
52.	Perkakas Bengkel Kayu Lain-lain	7	6	1	
53.	Peralatan Las Lain-lain	14	13	1	
54.	Receiver	1	v		
55.	Tang	1	v		
56.	Alat Processing Lain-lain	2	v		
57.	Alat Pengemas Makanan	2	v		
58.	Mesin Kontrol/Jaga	8	v		
59.	Brankas	1			
60.	Meja Panjang	2	v		V
61.	Meja Biro	2	v		
62.	Oven Listrik	2	v		
63.	Tabung Gas	2	v		
64.	Dispenser	1	v		
65.	Alat Penggiling Daging	3	3		
66.	Mesin Jahit	37	36	1	
67.	Tangga Alumunium	1	v		
68.	Tong Sampah	2	v		
69.	Tabung Pemadam	1	v	V	
70.	Scanner	1	v		
71.	Hardisk Eksternal	7	7		

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
72.	Pressure Gauge	2	v		
73.	Water Jet Spray	1	V		2
74.	Mixer	2	2		
75.	Mesin Jahit Pasangan Kancing	2	V		
76.	Mesin Jahit 3 Pasha	1	v		
77.	Lead Detector	2	v		
78.	Meja PNS Non Struktural	2	v		
79.	Mesin Bor	4	v		
80.	Mesin Proses Lain (Pengolah Batu Akik)	2	v		
81.	Modem	1	v		
82.	Mixer	1	v		
83.	Papan Tulis	5	v		
84.	Software	4	v		
85.	PC Server	1	v		
86.	Food Prosesor	2	v		
87.	Oven Gas	1	v		
88.	Sealer	6	v		
89.	Panci Presto	1	v		
90.	Pisau Set	8	v		
91.	Frezer Kulkas	2	v		
92.	Meja Konter	1	v		
93.	Bangku Tunggu	4	v		
94.	Lemari 3 Pintu	1	v		
95.	Rak Kayu	5	v		
96.	Gantungan Kain	5	v		5
97.	Meja Rapat	40	32		8
98.	Kursi Rapat	48	v		
99.	Cermin	3	v		
100.	Lemari Etalase	3	v		
101.	Manekin Fullbody	5	v		
102.	Manekin Halfbody	5	v		
103.	Rangka Spanduk	1	v		
104.	Kursi Tunggu	2	v		
105.	Vacum Cleaner	1	v		
106.	Karpet	10	v		
107.	Televisi 43 inc	1	v		
108.	Televisi 55 inc	1	v		
109.	Handy Talky	5	v		
110.	Kursi Kerja Instruktur	20	v		
111.	Meja Kerja Instruktur	9	v		
112.	Kursi Rapat BLK	56	v		
113.	Mesin Las	2	v		
114.	Mobil EXPO	1	v		
115.	CCTV	2	v		
116.	Lampu Pipa	1	v		

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
117	Leter Box	1	v		
118	Neon Box	2	v		
119	Showcase	2	v		
120	Sliding Flat Glass	2	v		
121	Tanah Persil Lainnya	180.000 m ²			
122	Tanah untuk Jalan Lainnya	260.000 m ²			
123	Tanah Kampung	5.414 m ²			
124	Rumah Kemas	1	v		
125	Lemari Besi	2	v		
126	Rak Arsip	2	v		
127	Lemari Arsip	2	v		
128	Rangka Baleho	1	v		
129	Shofa Minimalis	2	v		
130	Alat Semprot Rumput Elektrik	2	v		

Tabel 1. 1 Gambaran Sarana dan Prasarana Tahun 2022

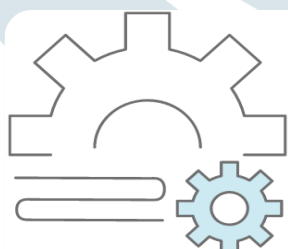
d) Data Statistik

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dengan ini melaksanakan tentang ketenagakerjaan dan perindustrian, adapun Data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

a. Pelatihan dan Produktivitas (Latas)

Pada Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan tenaga kerja meliputi standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas.



**PELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS(Latas)**

Kinerja Pelayanan Pelatihan dan Produktivitas pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**REKAPITULASI DATA PENINGKATAN KUALITAS PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT
KEADAAN JANUARI s/d DESEMBER 2022**

NO	LEMBAGA PENYELENGGARA	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA (Org)			JUMLAH KELULUSAN (Org)		SUMBER DANA	KETERANGAN
			L	P	JUMLAH	PELATIHAN / PEMAGANGAN	UJI KOMPETENS		
1	BBPLK SEMARANG	PBK Institutional Boarding	1	5	6	6	6	APBN	
2	BLK PELAIHARI	PBK Institutional non Boarding	107	133	240	240	176	APBN	15 Paket
		Pelatihan yang dilaksanakan di Desa	32	80	112	112	0	APBD	7 Paket
JUMLAH Pelatihan oleh BLK Pelaihari			139	213	352	352	176		
3	BLK KOMUNITAS	PBK Institutional Non Boarding	25	39	64	64	30	Mandiri dan APBN	2 Paket Mandiri, 2 Paket APBN
4	LPK SWASTA	PBK Institutional Boarding	153	370	523	472	62	Mandiri	
5	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. Kal-Sel	Pemagangan dalam negeri	26	4	30	30	30	APBN	3 Paket
JUMLAH PBK			312	551	863	812	304		
JUMLAH PBK & PELATIHAN DI DESA OLEH BLK PELAIHARI			344	631	975	924	304		

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Data Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja DISNAKERIND

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian target Program Unggulan Bupati Tanah Laut yaitu Pelatihan 500 orang siap kerja per tahun untuk Tahun 2022 telah dilampaui.

b. Penempatan Tenaga Kerja (Penta)

Pada Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan



kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang penempatan tenaga kerja meliputi pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.

Pelayanan penempatan tenaga kerja pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**REKAPITULASI DATA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
SUBKOORDINATOR PENEMPATAN TENAGA KERJA S.D DESEMBER 2022**

NO	URAIAN	BULAN SEBELUMNYA			BULAN INI						S.D BULAN INI		
					BERTAMBAH			BERKURANG					
		L	P	JUMLAH PER TAHUN	L	P	JUMLAH PER TAHUN	L	P	JUMLAH PER TAHUN	L	P	JUMLAH PER TAHUN
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8 = 6+7	9	10	11 = 9+10	12 = (3+6)-9	13 = (4+7)-10	14 = 2+13
A	PENCARI KERJA	1.040	416	1.456	44	13	57	73	80	153	1.011	349	1.360
B	LOWONGAN KERJA	177	68	245	22	5	27	0	0	0	199	73	272
C	PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI (PTKDN)	50	69	119	0	0	0	0	0	0	50	69	119
D	PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI/ PMI	1	3	4	0	2	2	0	0	0	1	5	6
E	TENAGA KERJA ASING (TKA)	86	3	89	0	0	0	0	0	0	86	3	89

Tabel 1. 3 Rekapitulasi Data pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Subkooor Penta

a. Perluasan Kesempatan Kerja (Luasja)

Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang perluasan kesempatan kerja meliputi penyusunan dokumen rencana tenaga mikro, pelatihan berbasis kewirausahaan, penumbuhan wirausaha baru, dan pelatihan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI) purna.

Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

REKAPITULASI DATA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT TAHUN 2022						
Lembaga Penyelenggara	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta (Org)			Anggaran	Keterangan
		L	P	JUMLAH		
A. PELATIHAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN						
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut	Sosialisasi Penumbuhan Wira Usaha Baru bersama Tim Mitra Tala Preneur dalam Manunggal Tuntung Pandang Tahun 2022	140	166	306	APBD	Dilaksanakan di 25 Desa pada Tahun 2022
B. PENYUSUNAN RTK MIKRO						
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut	Sosialisasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	13	7	0	APBD	Kegiatan 1kali Sosialisasi Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro
	Pelaporan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	-	-	-	APBD	Telah disusun 1 Dokumen RTK Mikro oleh 1 Perusahaan yaitu PT. JBG
JUMLAH		13	7	0		
C. PELATIHAN PEMBERDAYAAN BAGI PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)						
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut	Pelatihan Pembuatan Roti	0	20	20	APBD	dilaksanakan tanggal 26 s.d 27 Oktober 2022 di Desa Kandangan Lama
JUMLAH		0	20	20		
TOTAL		153	193	326		

Tabel 1. 4 Rekapitulasi Data Perluasan Kesempatan Kerja

2. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a. Persyaratan Kerja

Subkoordinator Persyaratan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang persyaratan kerja meliputi Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, hubungan kerja, kesetaraan syarat kerja, dan kesejahteraan pekerja, diantara statistik hasil kerja pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut :

PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN TAHUN 2022					
No	Tanggal/Bulan	Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Kepala Dinas	Keterangan Kode Kertas
1	Januari	PT. Sukses Wijaya Adimakmur	Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati	023 Tahun 2022	SYAKER 136-138
2	Februari	PT. Agung Jasa Poetra	Jl. A Yani Ds. Banyu Irang, Kec. Bati-Bati	024 Tahun 2022	SYAKER 165-167
3	Maret	-	-	-	-
4	April	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	Jl. A Yani, Ds. Nusa Indah, Kec. Bati-Bati	4/HI.00.00/00.0000.211028022/B/II/2022	Pengesahan Kementerian/PP Pusat
5		PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Jl. A Yani, Ds. Sambangan, Kec. Bati-Bati	033/DTKP/HIJSTK-PK/IV/2022	Syaker 201-203
6		PT. Bandangantirta Agung	Jl. Raya Bentok Kampung RT.05/Rw.01, Kec. Bati-Bati	035/DTKP/HIJSTK-PK/IV/2022	HIJSTK 0005-0007
7	Mei	PT. Jorong Abadi Jaya	Jl. A Yani, Ds. Asam-Asam, Kec. Jorong	040/DTKP/HIJSTK-PK/V/2022	HIJSTK 0019-0021
8	Juni	-	-	-	-
9	Juli	PT. Kintap Jaya Wattindo	Desa Kintap, Kecamatan Kintap	050 tahun 2022	HIJSTK 0081-0083
10		PT. Patriot Intan Abadi	Jl A Yani Km. 33, Ds. Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	049 Tahun 2022	HIJSTK 0073-0075
11		PT. Ebimas Besar	Jl. A Yani km. 45,6 Desa Pulau Sari, Kec. T Ulang	051 Tahun 2022	HIJSTK 0068-0070
12	Agustus	PT. Borneo Media Kreatif	Jl. Basuki Rahmat, Pelaihari	054 Tahun 2022	HIJSTK 0120-0122
13	September	PT. Batu Gunung Mulia Putra Agro	Ds. Tajau Mulya, Kec. Batu Ampar	056 Tahun 2022	HIJSTK 0170-0172
14	Oktober	PT. Karimata Timur	Jl. A Yani Km. 34, No. 88, Desa Nusa Indah, Kec. Bati-Bati	057 Tahun 2022	HIJSTK 0210-0212
15	November	CV. Bumi Nusantara Food	Jl. Perintis Raya, Ds. Nusa Indah No. 143 Rt.05/III, Kec. Bati2	059 Tahun 2022	HIJSTK 0273-0275
16	November	PT. Rukun Abadi Sejahtera	Jl. A Yani Km. 30, Ds. Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	060 Tahun 2022	HIJSTK 0290-0292
17	Desember	PT. Batu Mas Timur	Jl. A Yani, Ds. Karang Rejo, Kec. Jorong	062 Tahun 2022	HIJSTK 0304-0306

Tabel 1. 5 Data Pengesahan Peraturan Perusahaan

PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA						
TAHUN 2022						
No	Tanggal dan Bulan	Nama Perusahaan	Alamat	Nomor SK Pendaftaran	Jangka Waktu	Keterangan
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-
6	Juni	PT. Sinar Nusantara Industries	Jl. A Yani km.31, Ds. Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	047/DTKP/HIJSTK-PK/VI/2022	2 Tahun	HIJSTK 0043-0045
7	Juli	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-
9	September	PT. Indofood CBP Sukses Makmur, tbk	Ds. Liang Anggang km. 32, Kec. Bati-Bati	055/DTKP/HIJSTK-PK/IX/2022	2 Tahun	HIJSTK 0125-0127
10	Oktober	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-

Tabel 1. 6 Data Pendaftara Perjanjian Bersama

PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)						
TAHUN 2022						
No	Bulan	Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Register	Jangka Waktu	Keterangan
1	Januari	PT. Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	001-018	1 tahun	18 orang
2	Januari	PT. Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	019-040	1 tahun	22 orang
3	Januari	PT. Pribumi Citra Megah Utama	Kintap	041-051	1 tahun	11 orang
4	Januari	PT. Panen Embun Kemakmuran	Bati-Bati	052-057	1 tahun	6 orang
5	Januari	PT. Mandiri Karya Kirana	Bati-Bati	058-275	1 tahun	216 orang
6	Januari	PT. Patriot Intan Abadi	Tambang Ulang	276-278	1 tahun	3 orang
7	Februari	PT. Smart, TLTE	Kintap	279-288	1 Tahun	11 orang
8	Februari	PT. Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	289-297	1 Tahun	9 orang
9	Februari	PT. Prima Makmur Bersama	Bati-Bati	298-404	1 Tahun	107 orang
10	Februari	PT. Patriot Intan Abadi	Tambang Ulang	405-418	1 Tahun	14 orang
11	Maret	PT. Patriot Intan Abadi	Tambang Ulang	419-428	1 Tahun	10 orang
12	Maret	PT. Smart, TLTE	Kintap	429-431	1 Tahun	3 orang
13	Maret	PT. GMK Barat	Batu Ampar	432-450	1 Tahun	19 orang
14	Maret	PT. Panen Embun Kemakmuran	Bati-Bati	451-471	1 Tahun	21 orang
15	Maret	PT. Pribumi Citra Megah Utama	Kintap	472-512	1 Tahun	41 orang
16	Maret	PT. Pribumi Citra Megah Utama	Kintap	513-527	1 Tahun	15 orang
17	Maret	PT. Patriot Intan Abadi	Tambang Ulang	528-538	1 Tahun	11 orang
18	April	PT. Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	539-571	1 Tahun	33 orang
19	April	PT. Patriot Intan Abadi	Tambang Ulang	572-583	1 Tahun	12 orang
20	April	PT. Japfa Comfeed Indonesia	Bati-Bati	589-599	1 Tahun	16 orang
21	April	PT. Pribumi Citra Megah Utama	Kintap	600-634	1 Tahun	35 orang
22	April	PT. GMK PKS	Kintap	635-656	1 Tahun	22 orang
23	April	PT. GMK PKS	Kintap	657-668	1 Tahun	12 orang
24	April	PT. Panen Embun Kemakmuran	Bati-Bati	669-716	1 Tahun	48 orang
25	Mei	PT. Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	717-728	1 Tahun	12 orang
26	Mei	PT. Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	729-755	1 Tahun	21 orang
27	Mei	PT. Smart, TLTE	Kintap	756-758	1 Tahun	3 orang
28	Mei	PT. GMK PKS	Jorong	759-780	1 Tahun	21 orang
29	Mei	PT. Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	781-790	1 Tahun	19 orang
30	Mei	PT. Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	791-800	1 Tahun	10 orang
31	Juni	But Hyundai Engineering, Co, Ltd	Jorong	801-948	1 Tahun	148 orang
32	Juni	PT. Putra Citra Megah Utama	Kintap	949-969	1 Tahun	21 orang
33	Juni	PT. Patriot Intan Abadi	Tambang Ulang	970-979	1 Tahun	10 orang
34	Juni	PT. Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	980-986	1 Tahun	7 orang
35	Juni	PT. Gawi Makmur Kalimantan (Tengah)	Jorong	987-999	1 Tahun	13 orang
36	Juli	PT. Smart, TLTE	Kintap	1000-1012	1 Tahun	12 orang
37	Juli	PT. Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	1013-1029	1 tahun	16 orang
38	Juli	PT. Pribumi Citra Megah Utama	Kintap	1030-1044	1 Tahun	14 orang
39	Juli	PT. Pribumi Citra Megah Utama	Kintap	1045-1059	1 Tahun	14 orang
40	Juli	PT. Kartika Karya Nusantara	Jorong	1060-1107	1 Tahun	47 orang
41	Juli	PT. Kartika Karya Nusantara	Jorong	1108-1140	1 Tahun	32 orang
42	Juli	PT. Kartika Karya Nusantara	Kintap	1141-1180	1 Tahun	39 orang
43	Agustus	PT. Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	1181-1203	1 Tahun	23 orang
44	Agustus	PT. Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	1204-1211	1 Tahun	8 orang
45	Agustus	PT. Smart, TLTE	Kintap	1212-1223	1 Tahun	12 orang
46	Agustus	PT. Panen Embun Kemakmuran	Bati-Bati	1224-1242	1 Tahun	18 orang
47	Agustus	PT. Kartika Purna Yudha	Banjarmasin	1243-1268	1 tahun	26 orang
48	Agustus	PT. Kartika Karya Nusantara	Kintap	1269-1342	1 Tahun	92 orang
49	Agustus	PT. Kartika Karya Nusantara	Kintap	1343-1361	1 Tahun	93 orang
50	Agustus	PT. Tata Wisata	Kintap	1362-1376	1 Tahun	15 orang

51	Agustus	PT. Patriot Intan Abadi	Tambang Ulang	1377-1384	1 Tahun	8	orang
52	Agustus	PT. Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	1385-1388	1 Tahun	4	orang
53	Agustus	PT. Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	1389-1437	1 Tahun	49	orang
54	Agustus	PT. Smart, TLTE	Kintap	1438-1443	1 Tahun	6	orang
55	Agustus	PT. Putra Citra Megah Utama	Kintap	1444-1456	1 Tahun	15	orang
56	Agustus	PT. Putra Citra Megah Utama	Kintap	1457-1471	1 Tahun	13	orang
57	September	PT. Anugerah Emas Alihdaya	Kintap	1472-1512	1 Tahun	41	orang
58	September	PT. ISS	Kintap	1513-1515	1 Tahun	3	orang
59	September	PT. Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	1516-1536	1 Tahun	20	orang
60	September	PT. Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	1537-1552	1 Tahun	14	orang
61	September	PT. GMK PKS	Jorong	1553-1557	1 Tahun	5	orang
62	September	But Hyundai Engineering, Co, Ltd	Kintap	1558-1612	1 Tahun	15	orang
63	September	But Hyundai Engineering, Co, Ltd	Kintap	1613-1617	4 Bulan	5	orang
64	Oktober	PT. Patriot Intan Abadi	Tambang Ulang	1618-1625	1 Tahun	8	orang
65	Oktober	PT. Panen Embun Kemakmuran	Bati-Bati	1626-1645	1 Tahun	20	orang
66	Oktober	PT. Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	1646-1658	1 Tahun	13	orang
67	Oktober	PT. Putra Citra Megah Utama	Kintap	1659-1688	1 Tahun	30	orang
68	Oktober	PT. Hokkan Deltapack	Bati-Bati	1689-1709	1 Tahun	21	orang
69	Oktober	PT. Hokkan Deltapack	Bati-Bati	1710-1721	1 Tahun	12	orang
70	Oktober	PT. Japfa Comfeed Indonesia	Bati-Bati	1722-1723	1 Tahun	2	orang
71	Oktober	PT. Darma Henwa	Kintap	1724-1785	1 Tahun	62	orang
72	Oktober	PT. Darma Henwa	Kintap	1786-1846	1 Tahun	61	orang
73	Oktober	PT. Smart, TLTE	Kintap	1847-1848	1 Tahun	2	orang
74	Oktober	PT. Smart, TLTE	Kintap	1849	1 Tahun	1	orang
75	Oktober	PT. Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	1850-1860	1 Tahun	11	orang
76	Oktober	PT. Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	1861-1866	1 Tahun	6	orang
77	Oktober	PT. Metito Indonesia	Jorong	1867-1868	1 Tahun	2	orang
78	November	PT. Patriot Intan Abadi	Tambang Ulang	1869-1876	1 Tahun	7	orang
79	November	PT. Pribumi Citra Megah Utama	Kintap	1877-1895	1 Tahun	18	orang
80	November	PT. Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	1896-1897	1 Tahun	2	orang
81	November	PT. Gawi Makmur Kalimantan (Tengah)	Jorong	1898-1899	1 Tahun	2	orang
82	November	PT. Smart, TLTE	Kintap	1990-1901	1 Tahun	2	orang
83	November	PT. Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	1902-1909	1 Tahun	5	orang
84	November	PT. Panen Embun Kemakmuran	Bati-Bati	1910-1928	1 Tahun	18	orang
85	November	PT. Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	1929-1932	1 Tahun	3	orang
86	November	PT. Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	1933-1962	1 Tahun	30	orang
87	November	But Hyundai Engineering, Co, Ltd	Jorong	1963-1985	1 Tahun	20	orang
88	November	PT. Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	1986-	1 Tahun	1	orang
89	November	PT. Patriot Intan Abadi	Tambang Ulang	1987-1993	1 Tahun	6	orang
90	November	PT. Metito Indonesia	Jorong	1996-	1 Tahun	1	orang
91	Desember	PT. Darma Henwa	Kintap	1997-2070	1 Tahun	74	orang
92	Desember	PT. Putra Citra Megah Utama	Kintap	2071-2082	1 Tahun	12	orang
93	Desember	PT. Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	2083-2090	1 Tahun	16	orang
94	Desember	PT. SSDK	Kintap	2099-2013	1 Tahun	5	orang
95	Desember	PT. Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	2014-2117	1 Tahun	103	orang
96	Desember	PT. Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	2118-2122	1 Tahun	4	orang
97	Desember	PT. Hokkan Deltapack	Bati-Bati	2123-2131	1 Tahun	9	orang
98	Desember	PT. Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	2132-2151	1 Tahun	20	orang
						2268	orang

Tabel 1. 7 Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

b. Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pada Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja meliputi standarisasi dan fasilitasi pengupahan, pengembangan pengupahan, program jaminan sosial dan kepesertaan jaminan sosial, pada tahun 2022 dalam pelaksanaan tugasnya dapat tercermin pada tabel-tabel sebagai berikut :

INDEKS KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK KEPESERTAAN FORMAL				
Dasar : Laporan BPJS Nomor B/1280/102022				
Laporan Bulan : Desember 2022				
No	JUMLAH INSTANSI AKTIF YANG MENGIKUTI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
A	PEGAWAI PEMERINTAH NON ASN			
1	Sekretariat Daerah Kab. Tanah laut	146	Orang	
2	Sekretariat DPRD Kab. Tanah laut	35	Orang	
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17	Orang	
4	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	18	Orang	
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Laut	79	Orang	
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tala	93	Orang	
7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tala	18	Orang	
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tala	45	Orang	
9	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tala	23	Orang	
10	Dinas Sosial Kab. Tanah Laut	16	Orang	
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tala	29	Orang	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34	Orang	
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut	239	Orang	
14	Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut	35	Orang	
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	17	Orang	
16	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Tanah Laut	49	Orang	
17	Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut	351	Orang	
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	102	Orang	
19	Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut	47	Orang	
20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tala	14	Orang	
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan GTT	1734	Orang	
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20	Orang	
23	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Kontrak)	2	Orang	
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	Orang	
25	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanah Laut	14	Orang	

26	Badan Perencanaan Pembanguna Daerah	14	Orang	
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38	Orang	
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	15	Orang	
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19	Orang	
30	Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	9	Orang	
31	RSUD Hadji Boedjasin	292	Orang	
32	RSUD Hadji Boedjasin BLUD	211	Orang	
33	RSUD KH. MANSYUR	132	Orang	
34	Balai Latihan Kerja Pelaihari	6	Orang	
35	Kecamatan Kurau Kab. Tanah Laut	6	Orang	
36	Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut	6	Orang	
37	Kecamatan Takisung Kab. Tanah Laut	8	Orang	
38	Kecamatan Kintap Kab. Tanah Laut	9	Orang	
39	Kecamatan Tambang Ulang Kab. Tala	5	Orang	
40	Kecamatan Bajuin Kab. Tanah Laut	8	Orang	
41	Kecamatan Bati-Bati Kab. Tanah Laut	6	Orang	
42	Kecamatan Panyipatan Kab. Tanah Laut	10	Orang	
43	Kecamatan Bumi Makmur Kab. Tanah Laut	7	Orang	
44	Kecamatan Batu Ampar Kab. Tanah Laut	6	Orang	
45	Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut	8	Orang	
46	Kelurahan Pabahanan	2	Orang	
47	Kelurahan Angsau	5	Orang	
48	Kelurahan Karang Taruna	3	Orang	
49	Kelurahan Pelaihari	5	Orang	
50	Kelurahan Sarang Halang	4	Orang	
	JUMLAH	4017	Orang	
B	PEGAWAI PEMERINTAH NON ASN NON DINAS			
1	Dinas Pekerjaan Umum-Cipta Karya (Program Kotaku)	5	Orang	
2	Kementrian Agama Kantor Kab. Tanah Laut	9	Orang	
3	Palang Merah Indonesia Kab. Tanah Laut	8	Orang	
4	Penyuluh Sosial Masyarakat Kab. Tanah Laut	27	Orang	
	JUMLAH	49		
C	APARATUR DESA			
5	Kantor Desa Asam Jaya	11	Orang	
6	Kantor Desa Asam-Asam	13	Orang	
7	Kantor Desa Asri Mulya	9	Orang	
8	Kantor Desa Bukit Mulia	11	Orang	
9	Kantor Desa Bumi Harapan	8	Orang	
10	Kantor Desa Damit	10	Orang	
11	Kantor Desa Gunung Mas	11	Orang	
12	Kantor Desa Gunung Melati	8	Orang	
13	Kantor Desa Gunung Raja	9	Orang	
14	Kantor Desa Handil Birayang Atas	9	Orang	
15	Kantor Desa Handil Gayam	9	Orang	
16	Kantor Desa Handil Maluka	11	Orang	
17	Kantor Desa Jilatan Alur	11	Orang	
18	Kantor Desa Kampung Baru	9	Orang	
19	Kantor Desa Karang Rejo	9	Orang	
20	Kantor Desa Kintap Kecil	9	Orang	

21	Kantor Desa Martadah Baru	9	Orang	
22	Kantor Desa Pagatan Besar	9	Orang	
23	Kantor Desa Raden	8	Orang	
24	Kantor Desa Sebanban Baru	9	Orang	
25	Kantor Desa Sumber Jaya	10	Orang	
26	Kantor Desa Sungai Bakau	8	Orang	
27	Kantor Desa Sungai Cuka	11	Orang	
28	Kantor Desa Sungai Jelai	9	Orang	
29	Kantor Desa Sungai Rasau	9	Orang	
30	Kantor Desa Sungai Riam	10	Orang	
31	Kantor Desa Sungai Riam (Staff)	2	Orang	
32	Kantor Desa Tajau Pecah	13	Orang	
33	Kantor Desa Takisung	10	Orang	
34	Kantor Desa Tambak Sarinah	5	Orang	
35	Kantor Desa Tanjung	11	Orang	
36	Kantor Desa Tebing Siring	10	Orang	
	JUMLAH	300		
	PEMBERI KERJA AKTIF			
1	Pemberi Kerja Bukan Penyelenggara Negara	15499	Orang	420 Badan Usaha, 54 Penyelenggara Negara, 32 Desa
2	Pemberi Kerja Penyelenggara Negara	4017		
3	Aparatur Desa	300		
	JUMLAH	19816	Orang	
	TOTAL	19816	Orang	

Tabel 1. 8 Indeks Kepesertaan jaminan Sosial Kepesertaan Formal

INDEKS KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK KEPESERTAAN BUKAN PENERIMA UPAH / INFORMAL				
NO	JUMLAH PESERTA AKTIF YANG MENGIKUTI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN	JUMLAH PESERTA YANG MELAKUKAN KLAIM	ALASAN KLAIM	KETERANGAN/ DATA LAINNYA
1	8171	1	3	Meninggal dunia
	JUMLAH	1	Orang	

Tabel 1. 9 Indeks Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepesertaan Informal

DATA PEMBERI KERJA AKTIF YANG MENGIKUTI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN						
BADAN USAHA						
NO	PEMBERI KERJA AKTIF YANG MENGIKUTI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN	JUMLAH PEMBERI KERJA AKTIF YANG MENGIKUTI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN	JUMLAH TENAGA KERJA AKTIF YANG MENGIKUTI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN	JUMLAH PESERTA YANG MELAKUKAN KLAIM	ALASAN KLAIM	KETERANGAN/ DATA LAINNYA
1	Pemberi Kerja Bukan Penyelenggara Negara	422	18594	563	JHT, JKM, JP, JKK	
2	Pemberi Kerja Penyelenggara Negara	50	4017	16		
3	Aparatur Desa	34	300	73		
				5		
		506	22911			

Tabel 1. 10 Data Pemberi Kerja Aktif Yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan

INDEKS KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK KEPESERTAAN JASA KONSTRUKSI					
NO	JUMLAH PROYEK JASA KONSTRUKSI YANG MENGIKUTI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN	JUMLAH BADAN USAHA AKTIF YANG MENGIKUTI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN	JUMLAH PESERTA YANG MELAKUKAN KLAIM	ALASAN KLAIM	KETERANGAN/ DATA LAINNYA
1	1079	-	-	-	-
	JUMLAH	-	Orang		

Tabel 1. 11 Indeks Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepesertaan Jasa Konstruksi

c. Hubungan Industrial

Pada Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang hubungan industrial meliputi pemberdayaan organisasi pekerja dan pengusaha, kelembagaan hubungan industrial, kerjasama dan pemasyarakatan hubungan industrial, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemberdayaan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mediator, pada tahun 2022 dalam pelaksanaan tugasnya dapat tercermin pada tabel-tabel sebagai berikut :

DATA JUMLAH LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT
PERIODE DESEMBER 2022

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NOMOR BUKTI PENCATATAN	KETERANGAN
1	PT. Thiess Contractors Indonesia Tambang Wahana	Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut	568.02/01/DTKP/HIJST K/LKS-B/22.01	Baru
2	PT. Gawi Makmur Kalimantan Kebun Barat	Desa Damit Hulu RT. 017 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, Kode Pos 70882	568.02/02/DTKP/HIJST K/LKS-B/22.06	Pencatatan Kembali
3	PT. Darma Henwa Tbk.	Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	568.02/04/DTKP/HIJST K/LKS-B/22.05	Baru
4	PT. Smart Tbk. Perkebunan Tanah Laut	Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut	568.02/05/DTKP/HIJST K/LKS-B/22.07	Baru
5	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Jl. A. Yani Km. 35,5 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	568.02/06/DTKP/HIJST K/LKS-B/22.10	Baru
6	PT. CJ Cheiljedang Feed Kalimantan	Jl. A. Yani Km. 48 Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan	568.02/01/DTKP/HIJST K-HI/LKS-B/20.07	Pencatatan Kembali
7	PT. Gawi Makmur Kalimantan Kebun Tengah	Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	568.02/07/DTKP/HIJST K/LKS-B/05.12	Baru
TOTAL			7	

Tabel 1. 12 Data Jumlah Lembaga Kerjasama Bipartit

DATA JUMLAH SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH (SP/SB)
PERIODE DESEMBER 2022

NO.	NAMA SP/SB/ PERUSAHAAN	ALAMAT	JARINGAN ORGANISASI				TERGABUNG DALAM FEDERASI/ KONFEDERASI		NONOR BUKTI PENCATATAN	KETERANGAN
			MANDIRI		BERAFILIASI		FEDERASI	KONFEDERASI		
			DALAM HUBUNGAN KERJA	LUAR HUBUNGAN KERJA	DALAM HUBUNGAN KERJA	LUAR HUBUNGAN KERJA				
1	Serikat Pekerja Mandiri PT. Smart Tbk. Perkebunan Tanah Laut	Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan 70883	✓	-	-	-	-	-	560/05/DTKP/HIPK/SP SB/2018	Pencatatan Kembali
2	Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Kintap Jaya Wattindo Perkebunan Tebing Siring	Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut	-	-	✓	-	DPC SPPP SPSI Pimpinan Supardi Sacadipura	DPD SPSI	04/DTKP/HIPK- PK/I/2017	Pencatatan Kembali
3	Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Bridgestone Kalimantan Plantation	Desa Bentok Darat Kecamatan Bati- Bati Kabupaten Tanah Laut	-	-	✓	-	DPC SPPP SPSI Pimpinan Supardi Sacadipura	DPD SPSI	13/PENC/SP/SB/V/200 2	Pencatatan Kembali
4	Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Kintap Jaya Wattindo Perkebunan Pelaihari	Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut	-	-	✓	-	DPC SPPP SPSI Pimpinan Supardi Sacadipura	DPD SPSI	04/DTKP/HIPK- PK/I/2017	Pencatatan Kembali
5	Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Kintap Jaya Wattindo Perkebunan Induk	Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut	-	-	✓	-	DPC SPPP SPSI Pimpinan Supardi Sacadipura	DPD SPSI	06/DTKP/HIPK- PK/I/2017	Pencatatan Kembali
6	Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Kintap Jaya Wattindo Perkebunan Kintap I	Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut	-	-	✓	-	DPC SPPP SPSI Pimpinan Supardi Sacadipura	DPD SPSI	05/DTKP/HIPK- PK/I/2017	Pencatatan Kembali
7	Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PT. Kintap Jaya Wattindo Perkebunan Kintap II	Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut	-	-	✓	-	DPC SPPP SPSI Pimpinan Supardi Sacadipura	DPD SPSI	03/DTKP/HIPK- PK/I/2017	Pencatatan Kembali
TOTAL									7	

Tabel 1. 13 Data Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/PB)

DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
PERIODE DESEMBER 2022

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Hendra Giri DPP Pelaut Borneo Bersatu (SP/SB)	PT. Trans Coal Pasific			V	Anjuran Mediator/PHI
2	Sdr. Harry Santoso	PT. Sinar Nirwana Sari		V		Perjanjian Bersama / Bekerja kembali
3	Sdr. Zainal Hakim (Perwakilan pekerja PT. SWA)	PT. Sukses Wijaya Adimakmur			V	Anjuran Mediator/PHI
4	Sdr. Hartono dkk	PT. Sarana Subur Agrindotama		V		Anjuran Mediator/PHI
5	Sdri. Dewi Yana	PT. Mitra Citra Gemilang		V		Perjanjian Bersama

Tabel 1. 14 Data Tahapan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

**DATA JUMLAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PERIODE DESEMBER 2022**

No.	Perusahaan	Bidang Usaha	Alasan PHK	Alamat Perusahaan (Kecamatan)	Jumlah PHK (Orang)
1	PT. Trans Coal Pasific	Transportasi Laut	PHK Kesalahan	Kintap	1
3	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Industri Makanan Kemasan	PHK Efisiensi	Bati-Bati	12
4	PT. Bridgestone Kalimantan Plantation	Perkebunan Karet	Pensiun	Bati-Bati	4
5	PT. Bridgestone Kalimantan Plantation	Perkebunan Karet	Sakit	Bati-Bati	9
6	PT. Bridgestone Kalimantan Plantation	Perkebunan Karet	Meninggal Dunia	Bati-Bati	1
7	PT. Bridgestone Kalimantan Plantation	Perkebunan Karet	Mengundurkan Diri	Bati-Bati	12
8	PT. Bridgestone Kalimantan Plantation	Perkebunan Karet	PHK Efisiensi	Bati-Bati	1
9	PT. Candi Artha	Perkebunan Kelapa Sawit	PHK Pensiun	Batu Ampar	4
10	PT. Sukses Wijaya Adimakmur	Industri Manufaktur	PHK	Bati-Bati	18
11	PT. Mitra Citra Gemilang	Penetasan / Breeding	PHK	Bati-Bati	1
12	PT. Sarana Subur Agrindotama	Perkebunan Kelapa Sawit	PHK	Jorong	9
13	PT. Darma Henwa	Pertambangan	PHK	Kintap	5
TOTAL					77

Tabel 1. 15 Data Jumlah Pemutusan Hubungan Kerja

2. Bidang Perindustrian

a. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pada Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sumber daya industri, pemanfaatan sumber daya alam, dan pengembangan teknologi industri, pada tahun 2022 secara singkat dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:

1. Data Statistik Penambahan Jumlah IKM dan Masyarakat yang Mendapatkan Pelatihan

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Jumlah peserta pelatihan	0	0	40	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Kumulatif penambahan jumlah peserta pelatihan Tahun 2022	0	0	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50

Tabel 1. 16 Data Statistik Penambahan Jumlah IKM dan Masyarakat yang Mendapatkan Pelatihan

2. Data Statistik Penambahan Jumlah IKM yang Menggunakan Inovasi Teknologi dalam Kegiatan Produksi

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Jumlah IKM	0	0	4	0	0	0	3	0	23	0	0	0
Kumulatif Penambahan Jumlah IKM Pengguna Inovasi Teknologi Tahun 2022	0	0	4	4	4	4	7	7	30	30	30	30

Tabel 1. 17 Data Statistik Penambahan Jumlah IKM yang Menggunakan Inovasi Teknologi dalam Kegiatan Produksi

2. Data Statistik Penambahan Jumlah IKM yang Meningkatkan Kreatifitas Desain Produknya

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Jumlah IKM	83	2	5	7	13	10	3	7	4	0	0	0
Kumulatif Penambahan Jumlah IKM Pengguna Inovasi Teknologi Tahun 2022	83	85	90	97	110	120	123	130	134	134	134	134

Tabel 1. 18 Data Statistik Penambahan Jumlah IKM yang Meningkatkan Kreatifitas Desain Produknya

b. Sarana dan Prasarana Industri

Pada Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan industry kecil dan industri menengah, fasilitasi industri, industri hijau dan standarisasi industri, dan pengolahan data dan informasi industri, pada tahun 2022 secara singkat dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:

1. Data Statistik Jumlah Kumulatif IKM di Kabupaten Tanah Laut

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
- Jumlah IKM	3458,00	3458,00	3458,00	3458,00	3458,00	3458,00	3458,00	3458,00	3458,00	3458,00	4661,00	4818,00

Tabel 1. 19 Data Statistik Jumlah Kumulatif IKM di Tanah Laut

Jumlah pelaku Industri Kecil dan Menengah sampai dengan tahun 2022 sebanyak 3458 atau bertambah sebanyak 1360 IKM di tahun 2022.

2. Data Statistik Perusahaan dalam SIINAS Tanah laut

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Jumlah Industri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Jumlah Industri Kumulatif	32	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	33,00	33,00	34,00

Tabel 1. 20 Data Statistik Perusahaan dalam SIINAS Tanah Laut

3. Data Statistik Rekomendasi Perizinan Industri yang diterbitkan

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
- Rekomendasi IUI	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 1. 21 Data Statistik Rekomendasi Perizinan Industri yang diterbitkan

4. Data Statistik Fasilitas Perizinan NIB OSS

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Jumlah NIB OSS	1	1	16	0	0	2	0	0	2	2	0	0
Jumlah TOTAL NIB OSS	1,00	2,00	18,00	18,00	18,00	20,00	20,00	20,00	22,00	24,00	24,00	24,00

Tabel 1. 22 Data Statistik Fasilitas Perizinan NIB OSS

c. Pemberdayaan Industri

Pada Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang kerjasama, pengawasan perizinan dan pengendalian, dan promosi investasi industri yang pada tahun 2022 secara singkat dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Data Keikutsertaan Pameran Dalam dan Luar Daerah

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Keikutsertaan pada Pameran Luar Daerah Dalam Provinsi, Pameran Luar Daerah Luar Provinsi dan Pameran Dalam Daerah	1	1	2	5	8	14	18	22	26	27	31	34
	1	1	2	5	8	14	18	22	26	27	31	34

Tabel 1. 23 Data Keikutsertaan Pameran Dalam dan Luar Daerah

2. Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Jumlah Laporan

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Jumlah Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Tabel 1. 24 Jumlah Laporan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

3. UPT Balai Latihan Kerja

UPT BLK melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dalam hal Pelatihan Berbasis Kompetensi, data statistic di Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel Berikut :

NO.	JENIS PELATIHAN		JUMLAH (Org)
	JENIS PELATIHAN	KEJURUAN	
1	2	3	4
1.	PELATIHAN BIDANG INDUSTRI	1. Pembuatan Roti dan Kue	16
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	2. Konstruksi Baja Ringan	16
		3. Tata Rias Pengantin dan Hantaran	16
	KEGIATAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI DAN PEMAGANGAN BINALAVOTAS	4. Desainer Grafis Muda	16
		5. Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	16
		6. Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	16
		7. Computer Operator Assistant	16
		8. Pemasangan Instalasi Otomasi Listrik Industri	16
		9. Service Sepeda Motor Injeksi	16
		10. Plate Welder SMAW 3G-UP PF	16
2.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASER KOMPETENSI	1. Komputer	16
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2. Menjahit	16
		3. Menjahit	16
	KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	4. Menjahit	16
		5. Otomotif Sepeda Motor	16
		6. Teknik Las	16
		7. Pembuatan Roti dan Kue	16

Tabel 1. 25 Pelaksanaan Pelatihan UPT Balai Latihan Kerja

e) Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tidak menyelenggarakan urusan/ kegiatan dimaksud.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Urusan Wajib (Bidang Ketenagakerjaan)

a. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Perencanaan pada Rencana Kerja Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2022 telah sesuai dan selaras dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

b. Program Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada urusan wajib Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

2) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA :

a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
2. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (UPT. BLK)
3. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
4. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota

b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

c. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

1. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

3) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

a) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

1. Pelayanan antar Kerja
2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
3. Perluasan Kesempatan Kerja

b) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

c) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

1. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

5) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
2. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran pada urusan Bidang Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	%
A	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		17.585.433	17.542.957	99,76
	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	17.585.433	17.542.957	99,76
	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	17.585.433	17.542.957	99,76
B	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		120.333.024	115.749.343	96,19
	1	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	22.029.876	20.690.579	93,92
	1	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	22.029.876	20.690.579	93,92
	2	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	95.813.148	92.658.764	96,71

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	%
	1	Pelayanan antar Kerja	51.393.481	49.831.284	96,96
	2	Perluasan Kesempatan Kerja	9.406.515	8.504.972	90,42
	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	35.013.152	34.322.508	98,03
	3	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.490.000	2.400.000	96,39
	1	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	2.490.000	2.400.000	96,39
C	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		359.546.040	257.126.720	71,51
	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	340.633.448	243.749.128	71,56
	1	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	9.792.542	7.989.972	81,59
	2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	9.997.986	8.597.986	86,00
	3	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (UPT. BLK)	299.629.700	207.931.170	69,40
	4	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	21.213.220	19.230.000	90,65
	2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.981.944	8.916.944	74,42
	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.981.944	8.916.944	74,42
	3	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	6.930.648	4.460.648	64,36
	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	6.930.648	4.460.648	64,36
D	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		48.085.000	43.567.500	90,61
	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.735.000	29.005.000	91,40
	1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	16.560.000	16.560.000	100,00
	2	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	15.175.000	12.445.000	82,01
	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	16.350.000	14.562.500	89,07
	1	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	16.350.000	14.562.500	89,07
Jumlah			545.549.497	433.986.520	79,55

Tabel 2. 1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Ketenagakerjaan

d. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

- Belum terpenuhinya standar kompetensi tenaga kerja lokal.
- Belum maksimalnya pelayanan penempatan tenaga kerja.

- Masih terdapatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

2. Solusi :

- Peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan kewirausahaan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif
- Peningkatan Pelayanan penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
- Peningkatan jumlah penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).

2. Urusan Pilihan (Bidang Perindustrian)

a. Kesesuaian perencanaan pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Perencanaan pada Rencana Kerja Bidang Perindustrian Tahun 2022 telah sesuai dan selaras dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

b. Program Kegiatan

Program dan Kegiatan pada urusan pilihan Bidang Perindustrian adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

a) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
5. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

2) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

a) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

3) PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

a) **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran pada urusan Bidang Perindustrian dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	%
A	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		338.997.997	321.420.484	94,81
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		338.997.997	321.420.484	94,81
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	61.620.000	58.969.984	95,70
	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	129.286.498	125.701.500	97,23
	3	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3.536.500	3.205.000	90,63
	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	105.149.999	98.609.000	93,78
	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	39.405.000	34.935.000	88,66
B	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		11.890.000	5.987.500	50,36
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		11.890.000	5.987.500	50,36

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	%
	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6.425.000	2.915.000	45,37
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	5.465.000	3.072.500	56,22
C	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		69.598.532	46.514.600	66,83
	1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	69.598.532	46.514.600	66,83
	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	69.598.532	46.514.600	66,83
Jumlah			420.486.529	373.922.584	88,93

Tabel 2. 2 Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang Perindustrian

d. Permasalahan dan Solusi

2. Permasalahan :
 - Sektor industri belum tertata secara maksimal.
 - Masih rendahnya pertumbuhan industri kecil dan menengah.
2. Solusi :
 - Penataan sektor industri
 - Peningkatan pertumbuhan industri kecil menengah

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kesekretariatan)

a. Kesesuaian perencanaan pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Perencanaan pada Rencana Kerja Kesekretariatan Tahun 2022 telah sesuai dan selaras dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

b. Program Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Kesekretariatan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH

a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor :
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

UPT. BLK

1) PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH

a) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

b) Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Mebel

d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya
4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran Kesekretariatan dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

b. DINAS

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.949.187.536	7.093.924.125	79,27
	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	-	0,00
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-	0,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		247.954.528	231.546.380	93,38
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.991.282	6.941.200	86,86
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.042.895	36.260.100	88,35
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.087.910	30.895.400	88,05
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000	2.160.000	62,07
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.134.875	6.905.000	75,59
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.217.566	148.384.680	98,13
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		60.466.538	54.749.796	90,55
	1	Pengadaan Mebel	14.756.225	13.414.750	90,91
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.710.313	41.335.046	90,43
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		709.842.561	613.623.564	86,45
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.216.513	87.108.759	49,71
	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.115.000	26.350.000	84,69
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.511.048	500.164.805	99,34
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		133.920.995	123.552.150	92,26
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000	61.891.200	95,22
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.447.995	45.382.950	91,78
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.650.000	6.455.000	66,89
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.823.000	9.823.000	100,00
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.200.671	9.274.125	90,92
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.084.256	3.713.250	90,92
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.116.415	5.560.875	90,92
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.786.802.243	6.061.178.110	77,84
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.781.334.018	6.056.111.310	77,83
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.468.225	5.066.800	92,66
Jumlah			8.949.187.536	7.093.924.125	79,27

Tabel 2. 3 Alokasi dan Realisasi Kesekretariatan

c. UPT. BLK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		365.216.980	315.668.410	86,43
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		32.273.210	29.026.700	89,94
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.997.690	1.975.500	98,89
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.925.520	2.682.000	91,68
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2.650.000	1.998.800	75,43
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu		4.000.000	4.000.000	100,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20.700.000	18.370.400	88,75
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		13.492.600	12.952.272	96,00
1	Pengadaan Mebel		8.360.000	8.352.272	99,91
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5.132.600	4.600.000	89,62
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		266.478.505	239.054.440	89,71
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		79.794.725	53.951.995	67,61
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		30.776.380	29.745.000	96,65
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		155.907.400	155.357.445	99,65
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		52.972.665	34.634.998	65,38
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		25.000.000	16.118.400	64,47
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4.650.000	2.100.000	45,16
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		13.344.760	8.260.398	61,90
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		9.977.905	8.156.200	81,74
Jumlah			365.216.980	315.668.410	86,43

Tabel 2. 4 Alokasi dan Realisasi UPT Balai Latihan Kerja

d. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak ada permasalahan pada pencapaian kinerja bidang Kesektarian.

2. Urusan Pemerintahan Umum

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tidak menyelenggarakan urusan/ kegiatan dimaksud

BAB III

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Pemerintah Pusat melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda memberikan Tugas Pembantuan kepada Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 15 Paket kejuruan selama Tahun 2022.

a. Dasar Hukum

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka peran dan fungsi pemerintah pusat telah bergeser. Pemerintah pusat dalam hal ini tidak lagi berperan sebagai perencana sekaligus pelaksana tetapi bergeser menjadi regulator, mediator, motivator dan fasilitator. Konsekwensi logis dari perubahan ini adalah sistem dan mekanisme kerjasama antar lembaga pelatihan dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip saling ketergantungan positif, saling menguntungkan dalam mewujudkan otonominya masing-masing. Untuk itu dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja perlu menempatkan pencari kerja, para penganggur maupun tenaga kerja yang ingin meningkatkan keterampilan/ skill nya sebagai pelaku utama perlu program yang terpadu, sinergi dan relevan agar sumber daya pelatihan dapat berjalan dengan optimal, berdaya guna dan berhasil guna.

Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kerja sehingga dapat bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat yang memerlukan skill untuk terjun ke dunia kerja baik di industry maupun berwirausaha mandiri, skill sebagai modal dasar maupun penunjang dalam menggali sumber-sumber ekonomi di lingkungannya juga perlu dibekali dengan inovasi pengetahuan, keterampilan, dorongan semangat serta motivasi, guna menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih mantap, sehingga akan timbul sikap positif pada diri pencari kerja untuk mandiri, inovatif, bersemangat, tidak mudah menyerah dan selalu berupaya untuk mengembangkan diri. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu kegiatan pelatihan keterampilan tenaga kerja bagi para pencari kerja, pengangguran dan tenaga kerja yang ingin meningkatkan kompetensi nya.

Pengembangan metode Pelatihan bersifat bottom up (berdasarkan aspirasi/ kebutuhan masyarakat) sangat tepat, karena akan lebih terarah pada usaha pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (Community Empowerment and Community Development). Karena dalam metode ini masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap program pelatihan (partisipatif) mulai dari perencanaan, penentuan kebutuhan pelatihan, pelaksanaan tahap evaluasi pasca pelatihan maupun pendampingan. Upaya pembinaan masyarakat ini bersifat berkelanjutan, karena tujuan untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan mandiri tidak dapat dicapai seketika, memerlukan waktu yang lama.

Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang diberi tugas dari Kementerian Tenaga Kerja melalui Dana APBN Tahun Anggaran 2022, memiliki peran dalam pembangunan sumberdaya manusia melalui Pelatihan maupun peningkatan kemampuan, keterampilan/ skill dan kompetensi. Berkaitan dengan hal tersebut, di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mendukung keberhasilan kebijakan dan program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, selain itu juga dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia baik aparat pelaksana maupun tenaga kerja serta mengantisipasi kesenjangan kemampuan dan keterampilan, selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas lembaga pelatihan.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan / Dana Dekonsentrasi

Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut berkewajiban menjalankan peran dari sebagian unsur pemerintah dalam merealisasikan kebutuhan masyarakat berupa pelaksanaan kegiatan pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu pada Tahun Anggaran 2022 Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan kegiatan sesuai TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) yang realisasinya sesuai dengan target yang telah direncanakan. Penyelenggaraan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan dana Pemerintah yang dituangkan dalam DIPA Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-026.13.2.451108/2022 Tanggal 17 Nopember 2021, yang meliputi kegiatan administrasi maupun kegiatan-kegiatan operasional pelatihan Berbasis Kompetensi.

c. Program, Kegiatan

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 rencana pelaksanaan kegiatan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut dapat diuraikan sebagai berikut:

Rencana Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut, meliputi kegiatan :

No	Jenis Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Paket	Jumlah Total Peserta (orang)	Waktu Pelaksanaan (hari)	Lokasi Pelaksanaan
	MAK 4057.SCH.021.053				
1.	Kej. Pembuatan Roti dan Kue	1 Paket	16 orang	18 Hari	BLK Tanah Laut
2.	Kej. Pembuatan Roti dan Kue	1 Paket	16 orang	18 Hari	BLK Tanah Laut
3.	Kej. Pembuatan Roti dan Kue	1 Paket	16 orang	18 Hari	BLK Tanah Laut
4.	Kej. Konstruksi Baja Ringan	1 Paket	16 orang	23 Hari	BLK Tanah Laut
5.	Kej. Tata Rias Pengantin & Hantaran	1 Paket	16 orang	28 Hari	BLK Tanah Laut
6.	Kej. Computer Operator Asistant	1 Paket	16 orang	33 Hari	BLK Tanah Laut
7.	Kej. Desainer Grafis Muda	1 Paket	16 orang	33 Hari	BLK Tanah Laut
8.	Kej. Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	1 Paket	16 orang	33 Hari	BLK Tanah Laut
9.	Kej. Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	1 Paket	16 orang	33 Hari	BLK Tanah Laut
10.	Kej. Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	1 Paket	16 orang	33 Hari	BLK Tanah Laut
11.	Kej. Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	1 Paket	16 orang	33 Hari	BLK Tanah Laut
12.	Kej. Service Sepeda Motor Injeksi	1 Paket	16 orang	35 Hari	BLK Tanah Laut
13.	Kej. Service Sepeda Motor Injeksi	1 Paket	16 orang	35 Hari	BLK Tanah Laut
14.	Kej. Pemasangan Instalasi Otomasi Listrik Industri	1 Paket	16 orang	43 Hari	BLK Tanah Laut
15.	Kej. Plate Welder SMAW 3G-UP PF	1 Paket	16 orang	43 Hari	BLK Tanah Laut
	JUMLAH	15 Paket	240 orang		

Tabel 3. 1 Rencana Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT BLK

d. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

sejauh ini sarana dan prasarana masih cukup memadai untuk digunakan dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi walaupun sebagian work shop masih memerlukan peralatan yang lebih bagus lagi untuk menghasilkan peserta yang kompeten sesuai dengan misi BLK yaitu menghasilkan para manusia yang trampil dan kompeten.

Tahun 2022 BLK mendapatkan 15 paket pelatihan dengan satu kejuruan mendapatkan beberapa paket kegiatan, disini lah terdapat kendala karena peralatan dan workshop hanya dapat digunakan untuk satu orang instruktur saja sehingga pelatihan harus dilakukan beberapa tahap.

e. Sumber dan Jumlah anggaran yang digunakan

Dalam mendukung kegiatan Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut tersedia dana melalui DIPA Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-026.13.2.451108/2022 Tanggal 17 Nopember 2021, untuk BLK Kabupaten Tanah Laut mendapatkan alokasi dana sebesar **Rp. 927.622.000,-** (*Sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah*), meliputi Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, dana program tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi, dengan rencana anggaran belanja program tahun 2022 sebagai berikut :

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
026.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	927.622.000
	Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi BLK Kab. Tanah Laut (15 Paket)	
JUMLAH		927.622.000

Tabel 3. 2 Rencana Anggaran Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Jumlah anggaran kegiatan tersebut, terdiri atas beberapa kegiatan yaitu :

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
4057.SCH.021.053.A	Pelatihan Berbasis Kompetensi Non Boarding	772.235.000
4060.SCH.021.053.B	Administrasi Kegiatan PBK	155.387.000
UMLAH		927.622.000

Tabel 3. 3 Jumlah Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

f. Realisasi Pelaksanaa Program dan Kegiatan

Realisasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

No	Jenis Pelatihan	Target Jumlah Paket/ Peserta	L	P	Realisasi Jumlah Akt/Peserta	%	Ket.
MAK 4057.SCH.021.053							
1.	Kej. Pembuatan Roti dan Kue	1 Paket / 16 Orang	-	16	16	100	-
2.	Kej. Pembuatan Roti dan Kue	1 Paket / 16 Orang	-	16	16	100	-
3.	Kej. Pembuatan Roti dan Kue	1 Paket / 16 Orang	1	15	16	100	-
4.	Kej. Konstruksi Baja Ringan	1 Paket / 16 Orang	16	-	16	100	-
5.	Kej. Tata Rias Pengantin & Hantaran	1 Paket / 16 Orang	-	16	16	100	-
6.	Kej. Computer Operator Asistant	1 Paket / 16 Orang	4	12	16	100	-
7.	Kej. Desainer Grafis Muda	1 Paket / 16 Orang	7	9	16	100	-
8.	Kej. Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	1 Paket / 16 Orang	-	16	16	100	-
9.	Kej. Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	1 Paket / 16 Orang	-	16	16	100	-
10.	Kej. Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	1 Paket / 16 Orang	-	16	16	100	-
11.	Kej. Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	1 Paket / 16 Orang	15	1	16	100	-
12.	Kej. Service Sepeda Motor Injeksi	1 Paket / 16 Orang	16	-	16	100	
13.	Kej. Service Sepeda Motor Injeksi	1 Paket / 16 Orang	16	-	16	100	
14.	Kej. Pemasangan Instalasi Otomasi Listrik Industri	1 Paket / 16 Orang	15	1	16	100	
15.	Kej. Plate Welder SMAW 3G-UP PF	1 Paket / 16 Orang	16	-	16	100	
Jumlah			106	134	240		

Tabel 3. 4 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan UPT BLK

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %
026.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	927.622.000	899.546.835	96,97	99,830

Tabel 3. 5 Realisasi Penyerapan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

dengan rincian kegiatan yaitu :

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %
4060.SCH.021.053.A	Pelatihan Berbasis Kompetensi Non Boarding	772.235.000	754.008.575	97,64	99,93
4060.SCH.021.053.B	Administrasi Kegiatan PBK	155.387.000	145.538.260	93,66	98,51
JUMLAH		927.622.000	899.546.835	96,97	99,83

Tabel 3. 6 Realisasi Rincian Penyerapan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

g. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Jumlah pegawai tetap (PNS) yang ada di Balai Lathan Kerja Kabupaten Tanah Laut pada bulan Desember 2022 hanya 16 orang, untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Balai Lathan Kerja Kabupaten Tanah Laut, maka masih diperlukan adanya penambahan tenaga/ pegawai baru, hal ini disebabkan karena semakin padatnya kegiatan Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut. Untuk rencana ke depan, perlu adanya penambahan dan pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk langkah regenerasi kepegawaian, mengingat usia pegawai di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut yang ada yang telah memasuki usia menjelang pensiun (masa pensiun kurang dari 3 tahun ke depan). Hal ini dirasakan perlu untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi Balai Lathan Kerja Kabupaten Tanah Laut agar dapat berjalan efektif dan efisien.
2. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Balai Lathan Kerja Kabupaten Tanah Laut dimasa depan, maka diperlukan SDM pendukung yang lebih profesional dan memiliki kompetensi yang lebih baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. SDM yang ada masih perlu ditingkatkan kualitasnya melalui kegiatan pendidikan dan bimbingan teknis yang mendukung dan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi pegawai, baik petugas Instruktur pelatihan kerja sebagai ujung tombak kegiatan pelayanan pelatihan maupun pegawai non struktural. Demikian juga dengan jumlah pegawai yang lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

UPAYA TINDAK LANJUT (SOLUSI)

1. Untuk mengatasi permasalahan perihal kekurangan dan pengembangan pegawai, Balai Lathan Kerja Kabupaten Tanah Laut telah melakukan upaya tindak lanjut berupa pembuatan dan pengajuan daftar kebutuhan pegawai dan didalamnya terdapat informasi tentang jumlah pegawai dan kualifikasi pendidikan yang diperlukan kepada Pemerintah kabupaten Tanah Laut.
2. Pengajuan daftar rencana pegawai yang mengikuti diklat/ bimtek/ sosialisasi.
3. Pengajuan Anggaran berupa Rehab workshop baik melalui APBD maupun APBN.
4. Pengajuan Anggaran pembelian peralatan pelatihan baik melalui APBD maupun APBN, serta permintaan tambahan peralatan kepada Lemsar Kementerian Tenaga kerja RI.

BAB IV

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

1. Kerja Sama Daerah

- a. **Mitra yang diajak Kerjasama**
Kerjasama Dengan Bank KalSel, Bank BRI, Baznas, Forum Tala CSR
- b. **Dasar Hukum**
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- c. **Bidang Kerjasama**
Sosialisasi Permodalan
- d. **Nama Kegiatan**
Pelatihan- Pelatihan dalam kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri
- e. **Sumber dan Jumlah Anggaran**
-
- f. **Jangka waktu kerjasama**
Tak terbatas
- g. **Hasil (output) dari kerjasama**
Meningkatnya pemahaman masyarakat akan Peran Baznas dan Perbankan dalam hal permodalan.
- h. **Permasalahan dan Solusi**
-

2. **Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah**
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tidak menyelenggarakan urusan/ kegiatan dimaksud.

3. Pengelolaan Kawasan Khusus

- a. **Jenis Kawasan Khusus :**
Kawasan Industri
- b. **Status kepemilikan kawasan khusus :**
Milik Swasta
- c. **Sumber Anggaran :**
Swasta (pengelola)

d. Permasalahan yang dihadapi :

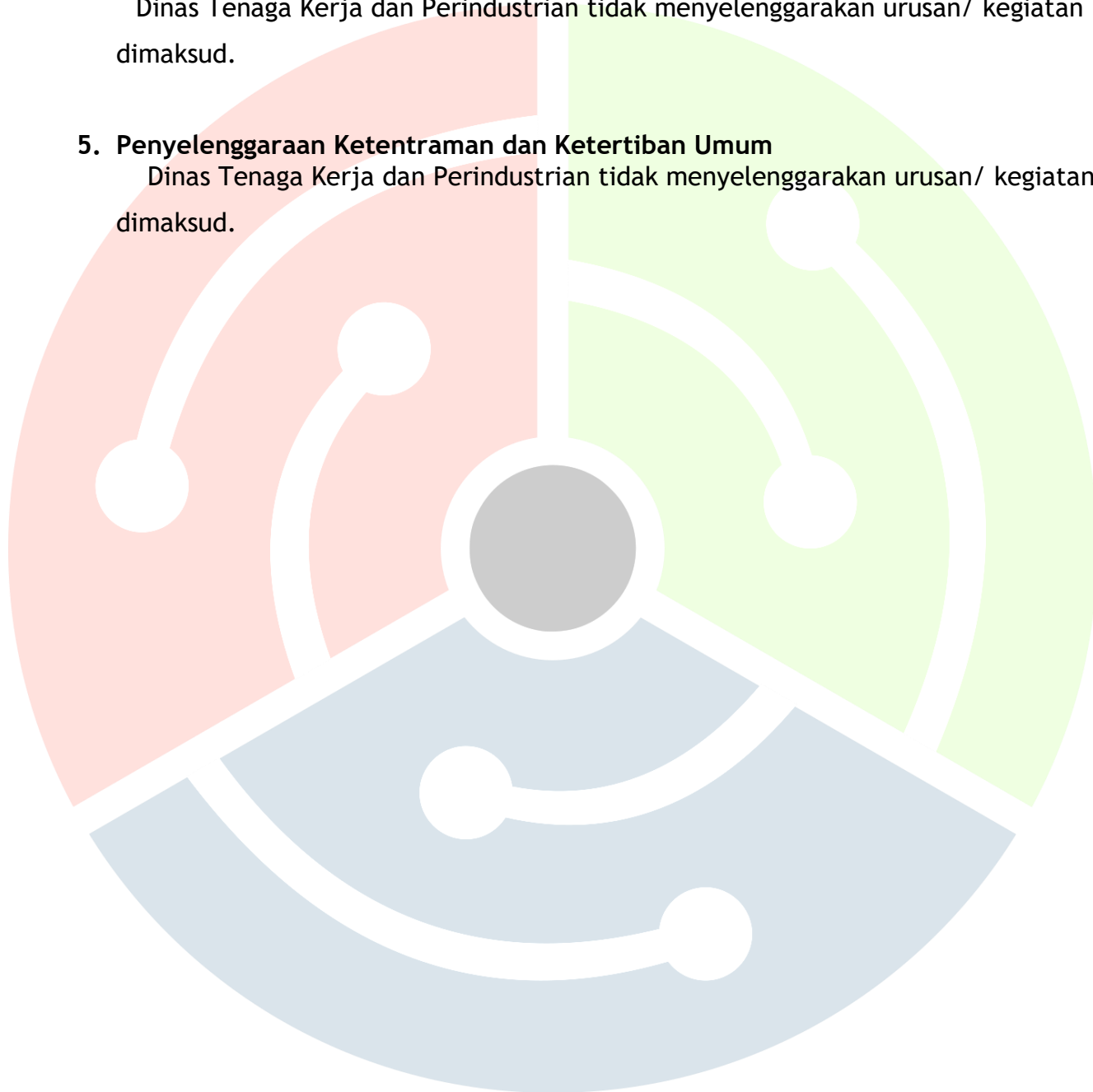
Pihak pengelola belum membangun infrastruktur dasar yang menjadi kewajiban untuk memperoleh izin IUKI seperti yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 TAHUN 2015 tentang Kawasan Industri.

4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tidak menyelenggarakan urusan/ kegiatan dimaksud.

5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tidak menyelenggarakan urusan/ kegiatan dimaksud.



BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu bahwa dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 telah memperoleh keberhasilan dalam menciptakan peningkatan keterampilan, kompetensi dan produktivitas pencari kerja, penempatan tenaga kerja, harmonisasi hubungan industrial melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan pemberdayaan industri kecil dan menengah.

1. Kesimpulan

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Perindustrian di Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Oleh karena itu penyelenggaraan dimaksud akan selalu bermuara pada pencapaian kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif yang bertumpu pada perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek sebagai akselerasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut.

Untuk terselenggaranya urusan wajib Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut hendaknya memperoleh anggaran yang memadai untuk revitalisasi sarana dan prasarana pendukung, peningkatan kualitas instruktur / tenaga kepelatihan, keadaan ini bertujuan untuk mengurangi peta kerawanan ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut.

Bidang Ketenaga kerjaan sebagai urusan wajib tentunya akan memperoleh perhatian dalam peningkatan kualitas SDM, anggaran, dan peralatan dalam rangka meminimalisasi peta kerawanan ketenaga kerjaan dan membekali calon tenaga kerja yang terampil dalam mempersiapkan memasuki dunia kerja di Kabupaten Tanah Laut.

Bidang Perindustrian sebagai urusan pilihan namun memiliki peran yang cukup strategis sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku industri kecil menengah dengan adanya peningkatan keterampilan dan standarisasi IKM serta pemberdayaan IKM melalui even-even promosi, Dekranasda, pusat promosi Tambang Ulang.

Sebagai daerah yang termasuk dalam pembangunan proyek strategi nasional, pembangunan kawasan industri jorong terus didorong percepatan pembangunan dan pengelolaan nya.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian, dilakukan melalui strategi :

1. Penguatan regulasi di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian
2. Penguatan kelembagaan dan personil
3. Membangun jaringan kerja
4. Pemanfaatan teknologi informasi

2. Keberhasilan/ Prestasi/ Penghargaan

- a. Prestasi Yang dicapai Oleh Lembaga/ masyarakat Binaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Prestasi / Penghargaan yang diraih Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS PENGHARGAAN	YANG MEMBERI PENGHARGAAN
1	Bupati Tanah Laut	Atas Partisipasinya yang sudah mendukung dan berperan aktif dalam penyusunan dokumen Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) untuk mewujudkan kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik di provinsi Kalimantan Selatan	Gubernur Kalimantan Selatan
2	Bupati Tanah Laut	Atas Dukungan dan Pembinaan kepada Perusahaan yang telah mendapatkan Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022	Gubernur Kalimantan Selatan
3	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Piagam Apresiasi Kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut karena berperan aktif dalam memacu kreatifitas dan mendorong peningkatan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kalimantan Selatan.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan
4	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Sertifikat Desain Industri Kopiah Tuntung Pandang (Kondang)	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

Tabel 5. 1 Penghargaan yang diraih Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

Prestasi / Penghargaan yang diraih Lembaga / Masyarakat Binaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PRESTASI/KEBERHASILAN	NAMA YANG BERPRESTASI	INSTANSI PENYELENGGARA	PERINGKAT DALAM PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	Penghargaan Siddhakarya	PT. Sinar Nusantara Industries	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalimantan Selatan	Kualifikasi Unggul	Penghargaan diserahkan di Hotel Jelita Banjarmasin
2	Penghargaan Siddhakarya	CV. LFC Multimedia Grafindo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalimantan Selatan	Kualifikasi Berkembang	Penghargaan diserahkan di Hotel Jelita Banjarmasin
3	Perusahaan Pelaksana Pemagangan Tahun 2022	PT. Sinar Nusantara Industries	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalimantan Selatan	-	Penghargaan diserahkan di Hotel Jelita Banjarmasin
4	Perusahaan Pelaksana Pemagangan Tahun 2022	PT. Panen Embun Kemakmuran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalimantan Selatan	-	Penghargaan diserahkan di Hotel Jelita Banjarmasin
5	Penghargaan Lembaga Kerja Sama Bipartit Tahun 2022	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan	Pemenang II Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	Penghargaan Diserahkan Di Hotel Banjarmasin Internasional

NO	NAMA PRESTASI/ KEBERHASILAN	NAMA YANG BERPRESTASI	INSTANSI PENYELENGGA RA	PERINGKAT DALAM PENGHARGA AN	KETERANG AN
6	Penghargaan Lomba Desain Mesin Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Perbengkelan Se Kalimantan Selatan	Saifuddin	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Industri Kayu Dan Logam Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan	Juara 1	Penghargaan Diserahkan Di Hotel Fave Banjarbaru
7	Penghargaan Lomba Desain Mesin Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Perbengkelan Se Kalimantan Selatan	Eddy Surahman	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Industri Kayu Dan Logam Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan	Juara 2	Penghargaan Diserahkan Di Hotel Fave Banjarbaru
8	Penghargaan Lomba Desain Motif Kain Sasirangan Pewarnaan Alam Se Kalimantan Selatan	Ikm Feraria Putri Sasirangan	Dekranasda Prov. Kalimantan Selatan	Juara III	Penghargaan Diserahkan Di Dekranasda Provinsi Kalsel Di Banjarmasin

Tabel 5. 2 Prestasi / Penghargaan yang diraih Lembaga / Masyarakat Binaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Pelaihari, 9 Januari 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,

MASTURI, S.STP

NIP. 19770705 199612 1 00